

**REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA:
DAMPAKNYA TERHADAP INFLASI DAN KONTRIBUSINYA
TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT**

Eny Haryati
enyharyati@gmail.com

Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRACT

Indonesian manpower (IM) is a term used to refer to the Indonesian migrants who work overseas. Although the exact number of the IM is not well recorded by the government of the Republic of Indonesia, the amount of the remittance the IM send home to their family is found to be quite significant. In 2005, the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia declared that the amount of the IM's remittance reached US\$ 2.9 billion, which was much higher than the government's expected amount (US\$ 1.9 billion). This study found out that (1) the IM's remittance affected the amount of the money spreading in the home district where the IM came from so that it enhanced the purchasing power of the people in the district towards the consumptive goods and services which, in turn, triggered the elevation of the prices of goods and services; (2) the IM's remittance stimulated the traders or merchants to determine the goods and services pricing which was commonly called the expected inflation; (3) most of the remittance was spent for consumptive goods and services and only a little amount of it was spent for investment; and (4) the IM's remittance was a factor that positively affected the increase of the human development index (HDI) in the IM's home district. To effectively increase the effect of the remittance towards the HDI in the IW's home district, a governmental policy that was oriented towards the development of the IM's family potentials and attempted to change people's behavior

Keywords: Remittance, Indonesian Manpower, Quality of Life, Human Development Index, Investment.

PENDAHULUAN

Secara nasional, bangsa Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan sosial yang berkaitan dengan pembangunan manusia (*human development*). Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yakni peringkat 109 dari 175 negara yang diukur (United Nations Development Program 2007) menjadi pertanda bahwa relatif rendahnya

kualitas hidup sebagian besar rakyat Indonesia masih menjadi permasalahan krusial yang belum mendapatkan jalan keluar. Pada saat yang sama, dua masalah besar, yakni masalah kemiskinan dan pengangguran, masih mengemuka. Masalah tersebut memiliki implikasi terhadap rendahnya dan atau nihilnya pendapatan (*income*) seseorang/suatu keluarga. Di titik inilah, ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dianggap sebagai penyebabnya. Di tengah mengemukanya persoalan ini, sebagian angkatan kerja Indonesia memutuskan untuk mencari peluang bekerja di luar negeri, dengan jalan menjadi tenaga migran, yang kemudian lebih akrab disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tidak kurang dari 3 juta orang TKI di sektor formal maupun informal yang bekerja di luar negeri pada tahun 2006 menghasilkan remitansi yang tidak kurang dari Rp.24 triliun per tahun dengan kontribusi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) berkisar 11% (Bank Indonesia 2008). Ironisnya, meski menjadi TKI diyakini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan, namun keberadaan TKI ternyata juga memicu lahirnya masalah.

Sejumlah permasalahan di bawah ini menjadi problema klasik yang cukup serius di sektor ketenagakerjaan, terutama yang terjadi di kalangan para TKI, meliputi: TKI cenderung tidak memiliki keahlian yang kompetitif; relasi sosial antara TKI dengan majikannya menempatkan TKI pada posisi subordinat; TKI rentan menjadi obyek eksploitasi oleh sejumlah aktor; sebagian TKI menghadapi masalah keluarga yang rumit pada pasca menjadi TKI; pola hidup hedonis menjadi fenomena di kalangan TKI, khususnya TKI yang telah mengalami peningkatan status sosial-ekonomi; sebagian besar TKI-Purna tidak memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan; jumlah TKI ilegal relatif besar. Sejarah mencatat bahwa dari 1,2 juta orang TKI ilegal yang ada di Malaysia pada tahun 2004; 820 ribu orang (68,33%) diantaranya diperkirakan berasal dari Indonesia (Depnakertrans, dalam Haryati 2004).

Sejumlah kalangan berasumsi bahwa keberaan TKI sungguh dilematis. Wawa (2003), misalnya, berasumsi bahwa salah satu problema dilematis terkait keberadaan TKI adalah di satu sisi TKI menjadi komunitas penyumbang devisa yang signifikan melalui remitansi yang dikirim ke kampung halamannya, namun di sisi lain banyak masalah yang lahir akibat menjadi TKI. Bahkan masalah seringkali juga masih terjadi di kalangan para TKI yang sukses secara ekonomi sekalipun. Pola belanja yang cenderung hedonis, misalnya, menjadi kebiasaan para TKI jenis ini.

Aliran remitansi TKI dan pola belanja yang demikian mengundang berbagai asumsi tentang implikasi yang dilahirkan. Dinamika asumsi tentang implikasi remitansi TKI dan pola hidup hedonis tersebut mengerucut pada dugaan bahwa pada daerah-daerah yang remitansi TKI-nya signifikan, berpengaruh konstruktif terhadap efektifitas pembangunan daerah, sekurang-kurangnya terhadap berputarnya roda perekonomian lokal. Sementara juga berkembang wacana bahwa apabila remitansi TKI dimanfaatkan untuk menciptakan

usaha ekonomi produktif (investasi), tidak untuk belanja konsumtif, maka remitansi TKI berpeluang dapat mendongkrak berkembangnya perekonomian daerah, yang sudah barang tentu pada saatnya berpeluang dapat meningkatkan kualitas hidup TKI beserta keluarganya khususnya, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya. Berangkat dari uraian di atas, maka dipandang perlu melakukan penelitian ini.

Terdapat tiga hal yang dijadikan fokus penelitian ini, yang secara metodologis disebut sebagai permasalahan penelitian (*research questions*), meliputi: (1) apa dampak aliran dana dari remitansi TKI terhadap inflasi dan kegiatan ekonomi masyarakat; (2) bagaimana pola penggunaan remitansi TKI; (3) bagaimana kontribusi remitansi terhadap peningkatan kualitas hidup TKI dan keluarganya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan : mengetahui perkiraan dampak remitansi TKI terhadap inflasi; mengetahui dampak remitansi TKI terhadap kegiatan ekonomi masyarakat; mengetahui pola penggunaan remitansi TKI oleh TKI dan atau keluarganya; mengetahui kontribusi remitansi TKI terhadap peningkatan kualitas hidup TKI dan keluarganya. Dengan mengetahui hal-hal tersebut diharapkan penelitian ini dapat merekomendasikan sejumlah pokok pikiran yang berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi peran remitansi TKI bagi peningkatan kualitas hidup TKI beserta keluarganya khususnya, dan bagi efektifitas pembangunan daerah terutama pembangunan manusia (*human development*) pada umumnya.

RERANGKA TEORETIS

Konsepsi Remitansi

Remitansi secara awam diartikan sebagai dana yang berasal dari transfer (baik dalam bentuk *cash* atau sejenisnya) dari seorang asing kepada sanak keluarga di negara asalnya. *International Monetary Found* (IMF 2008) mendefinisikan remitansi ke dalam 3 kategori, yaitu: (1) remitansi pekerja atau transfer dalam bentuk *cash* atau sejenisnya dari pekerja asing kepada keluarganya di kampung halaman, (2) kompensasi terhadap pekerjaan atau pendapatan, gaji atau renumerasi dalam bentuk *cash* atau sejenisnya yang dibayarkan kepada individu yang bekerja di suatu negara lain di mana keberadaan mereka adalah resmi, dan (3) transfer uang seorang asing yang merujuk kepada transfer kapital dari aset keuangan yang dibuat orang asing tersebut sebagai perpindahan dia dari satu negara ke negara lainnya dan bertempat tinggal lebih dari satu tahun. Untuk kepentingan penelitian ini remitansi didefinisikan sebagai pembayaran atau aliran atau transfer dana lintas batas negara dari orang ke orang, yang dalam prakteknya transfer dana tersebut dilakukan oleh para TKI yang bekerja di luar negeri, secara berulang kali, misalnya pengiriman uang setiap bulan kepada keluarga TKI ke daerah tempat TKI tersebut berasal.

Remitansi TKI

Menurut laporan Bank Dunia (dalam Bank Indonesia 2008), pada tahun 2006 jumlah uang yang dikirim pekerja asing ke negara asalnya merupakan aliran dana terbesar ke-2 di dunia. Melebihi jumlah uang bantuan internasional untuk berbagai negara berkembang

yang berjumlah US \$250 juta. Selain itu, remitansi tahunan dari para pekerja asing menurut Bank Dunia diperkirakan sebesar US \$ 67 milyar (Bank Indonesia 2008).

Sekalipun untuk mengukur remitansi tetaplah menjadi sebuah tantangan bagi sistem pembayaran seimbang (*balanced payment system*), namun pada tahun 2006 tercatat sebanyak 59 negara-negara yang sedang berkembang menerima lebih dari US\$ 1 miliar dalam bentuk remitansi. Laporan *Asian Development Bank* mengenai studi remitansi pekerja asing dari Asia Tenggara menyebutkan, bahwa remitansi dari para pekerja asing di luar negeri telah membantu memperkuat keseimbangan pembayaran negara, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga para pekerja yang kebanyakan (sebelumnya) berada pada dan atau di bawah garis kemiskinan; ini terutama terjadi di wilayah pedesaan (Sumarsono 2006).

Kenyataan membuktikan bahwa data mengenai berapa besaran remitansi hanya bertumpu pada laporan dari institusi formal saja, misalnya perbankan; sementara pada kenyataannya saluran-saluran informal menjadi cara yang juga lazim digunakan sebagai media pengiriman remitansi; akibatnya remitansi yang tercatat diperkirakan hanya setengahnya saja. Sebagai contoh, di negara-negara Timur Tengah, sebagian besar dari remitansi ditransferkan melalui jaringan broker informal, sehingga remitansi tersebut tidak tercatat oleh sistem pelaporan resmi (perbankan). Sama halnya dengan di Indonesia; tidak sedikit pengiriman remitansi dilakukan dengan menitipkan pada teman sekampung yang kebetulan pulang ke tanah air atau dibawa sendiri ketika pekerja tersebut (TKI) pulang karena *sambang* atau habis masa kontrak kerjanya. Oleh karena itu, remitansi yang dikirim dengan media semacam ini tidak tercatat secara resmi baik oleh lembaga resmi daerah maupun lembaga resmi nasional; pada saat yang sama kenyataan membuktikan bahwa saluran-saluran informal tersebut mendominasi pola sistem pengiriman remitansi, yang secara relatif disebabkan oleh karena tidak tersedianya bank atau institusi keuangan formal lainnya, selain faktor mahal dan awamnya jasa perbankan dipergunakan oleh kalangan mereka.

Bank Indonesia melaporkan bahwa penerimaan terbesar dari remitansi TKI adalah US\$ 1,5 miliar dan surplus transfer berjalan tahun 2007 mencapai US \$ 4,9 miliar. Sedangkan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengatakan, bahwa remitansi pada tahun 2007 menembus angka Rp 100 triliun.

Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu terhadap barang. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter

karena inflasi merupakan penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sementara itu para ekonom modern mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitungan moneter) terhadap barang-barang/komoditas.

Teori dan atau Kurva Phillips menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan tingkat pengangguran yaitu: “Semakin rendah tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin rendah atau bahkan bisa terjadi inflasi yang negatif (deflasi)”. Dengan kata lain terdapat *trade-off* antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Phillips menjelaskannya dalam publikasi studi yang menggambarkan hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran (*rate of unemployment*) di Inggris selama tahun 1869-1957 (Phillips 1958, dalam Mambo 2008).

Pada kenyataannya, hampir tidak ada inflasi yang disebabkan oleh satu kausa tunggal, sebab biasanya variabel pemicu terjadinya inflasi itu bersifat ganda. Namun jika di antara gandanya variabel penyebab inflasi dapat ditentukan mana variabel yang memberi kontribusi paling besar, maka dalam perspektif ini peluang penyebab inflasi secara umum dapat dijelaskan sebagaimana terdapat pada uraian berikut ini (Bank Indonesia Surabaya 2008).

Pertama, tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*) dapat menyebabkan inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* antara lain depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadinya *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi desakan biaya ini juga terjadi pada saat perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah.

Kedua, inflasi juga bisa disebabkan oleh tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*). Faktor penyebab terjadinya *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Ini terjadi di Indonesia antara tahun 2005 menuju tahun 2006, dengan kenaikan rata-rata inflasi dari 10,40 menjadi 13,33 (Bank Indonesia dalam Musthafa 2009).

Fenomena yang amat populer menjadi penyebab inflasi di kalangan para analis pasar adalah ekspektasi inflasi. Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Sejumlah penyebab inflasi yang tidak kalah

besar pengaruhnya adalah: (1) *spiralling inflation* yaitu inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya; (2) *imported inflation* adalah inflasi di negara lain yang ikut dialami oleh suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam pasar perdagangan internasional; (3) *domestic inflation* merupakan inflasi yang dialami oleh suatu negara karena terjadinya perubahan faktor-faktor penyebab inflasi yang ada di negara yang bersangkutan, misalnya kebijakan fiskal dan/atau kebijakan moneter; (4) inflasi yang merupakan gabungan dari ekspektasi inflasi dan tingkat pengangguran; (5) tingkat pengangguran yang relatif rendah, yang menurut Kurve Phillips inflasi yang terjadi akan tergantung pada ekspektasi inflasi dan deviasi dari *unemployment rate* terhadap *natural rate of inflation* (6) *natural rate of inflation* adalah inflasi yang diciptakan oleh sebab alamiah, misalnya yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat akibat gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian; (7) *human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri misalnya karena korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan (*excessive tax*), pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*), sebab pencetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara umum.

Faktor ekonomi dan non-ekonomi yang diperkirakan mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia antara lain dapat diidentifikasi berikut ini. Adanya peningkatan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang beredar ini di Indonesia disebabkan antara lain oleh peristiwa kenaikan harga migas di luar negeri; meningkatnya bantuan luar negeri; masuknya modal asing, khususnya investasi portofolio di pasar uang; meningkatnya anggaran pemerintah secara mencolok; depresiasi nilai rupiah dan gejolak mata uang konvertibel. Inflasi juga bisa didongkrak oleh adanya tekanan pada tingkat harga umum, yang dapat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian seperti penurunan produksi pangan akibat musim kering yang berkepanjangan; peningkatan harga komoditi umum secara mendadak; pencabutan program subsidi bahan bakar minyak; menaikkan harga bahan bakar minyak yang mencolok; kenaikan tarif listrik. Kebijakan Pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor non-migas; maupun kebijakan lainnya yang bersifat distortif juga dapat menyebabkan inflasi; seperti lonjakan inflasi setelah dikeluarkannya kebijakan devaluasi; kebijakan tata niaga yang menciptakan pasar yang oligopolistis dan monopolistis; pungutan-pungutan yang dikenakan dalam perjalanan lalu lintas barang dan mobilitas tenaga kerja; kebijakan peningkatan tingkat upah minimum regional. Penyebab lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan pertumbuhan *agregat demand* yang dipicu oleh perubahan selera masyarakat, atau kebijakan pemberian bonus perusahaan dan faktor spekulatif lainnya seperti pemberian bonus tunjangan hari raya menjelang hari raya keagamaan; pemberian bonus prestasi perusahaan; perkembangan pusat belanja yang ekspansif yang terkadang mematisasi fungsi keberadaan pasar tradisional di lokalitas tertentu (Bank Indonesia Surabaya 2008).

Peningkatan Kualitas Hidup

Pada konteks ini dibangun asumsi bahwa sebagian besar TKI berasal dari keluarga yang kualitas hidupnya relatif rendah atau keluarga miskin, yang sekurang-kurangnya diukur dari 4 indikator: (1) belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya (kebutuhan dasar) secara layak; (2) belum memiliki usaha ekonomi produktif dan atau sumber mata pencaharian yang berlanjut; (3) belum mampu berkembang secara mandiri; (4) belum dapat mengakses fasilitas publik yang merupakan hasil-hasil pembangunan, secara mekanisme pasar.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam pandangan United Nations Development Program (UNDP 2007), salah satu tujuan pembangunan, khususnya pembangunan manusia (*human development*) adalah meningkatkan kualitas hidup manusia, yang diukur melalui 3 indikator, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas hidup hampir pasti disertai dengan peningkatan ketiga indeks tersebut.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan topik yang dipilih, kegiatan utama penelitian ini melakukan identifikasi terhadap sejumlah data yang menjadi implikasi atau dampak atas aliran dana remitansi TKI terhadap inflasi dan kontribusi remitansi TKI terhadap peningkatan kualitas hidup TKI dan keluarganya yang pada gilirannya bisa jadi memiliki kontribusi terhadap perkembangan perekonomian lokal-regional tempat asal TKI.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kabupaten Malang, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten Malang menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah penempatan TKI di sepanjang tahun 2007. Dari jumlah total penempatan TKI yang berasal dari 38 kabupaten/kota se provinsi Jawa Timur tahun 2007 yang mencapai 59.048 orang, 6.860 orang diantaranya (11,62%) berasal dari kabupaten Malang (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur 2007).

Sampel

Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel secara kebetulan (*accidental sampling*). Responden pada penelitian ini adalah mereka (TKI dan atau TKI-purna) yang kebetulan bisa ditemui dan/atau diwawancarai saat pengumpulan data dilaksanakan. Setelah itu responden dipilih secara acak (random) dengan memanfaatkan data induk (*sampling frame*) daerah asal TKI dari Dinas Tenaga Kerja setempat. Jumlah responden ditentukan 60 orang di tiap kecamatan di 6 kecamatan yang menjadi kantong TKI. Penentuan responden juga memperhatikan variasi jenis kelamin, pekerjaan, serta negara tujuan. Dengan demikian jumlah responden dari kelompok TKI

dan atau TKI purna adalah 6x60 orang = 360 orang. Adapun data yang dapat dianalisis hanya 359 orang responden sebab data dari 1 orang responden mengalami cacat data.

Penelitian ini juga menempatkan para *stakeholders* remitansi TKI sebagai informan kunci. Mereka adalah sejumlah pihak terkait yang memiliki hubungan langsung dengan remitansi TKI, meliputi pejabat atau perwakilan dari 12 unsur, meliputi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten, Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten, *Money Changer* setempat, perbankan, pengurus kelompok/organisasi TKI, Lembaga Swadaya Masyarakat yang khusus menjadi Pemerhati TKI, Camat kepala wilayah, tokoh masyarakat, keluarga TKI, dan akademisi.

Teknik Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data untuk penelitian ini dilaksanakan melalui sejumlah metode. Pertama, dengan wawancara terstruktur, yakni wawancara yang dipandu oleh daftar pertanyaan. Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk bisa mendapatkan data yang konsisten dari masing-masing variabel, dan untuk memudahkan pelaksanaan analisis serta interpretasinya. Kedua, wawancara mendalam (Mallo 1990) dengan menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur, peneliti melakukan wawancara/diskusi terhadap responden/informan kunci melalui *focused group discussion* (FGD). Penggunaan teknik ini didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan kedalaman penggalian data, terutama data kualitatif sebagai tindak lanjut (penelusuran) dari data kuantitatif yang diperoleh melalui wawancara terstruktur. Ketiga, observasi (Goode dan Hatt 1980 dalam Moleong 1991) yang dilakukan terhadap data dan aktivitas yang dapat diamati, baik berupa data/aktivitas umum maupun data/aktivitas khusus yang berkaitan langsung dengan tema penelitian ini. Penggunaan teknik ini lebih untuk melakukan verifikasi/triangulasi atas data yang telah diperoleh melalui wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Teknik yang keempat adalah studi dokumen (Goode dan Hatt 1980 dalam Moleong 1991) terhadap data sekunder yang relevan. Pengambilan dokumen, foto, dan data pendukung lain merupakan bagian penting dari metode ini.

Taknik Analisis Data

Berdasarkan jenis pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini, dan dengan tetap memperhatikan kebutuhan hasil analisis untuk merealisasikan tujuan penelitian ini, maka terdapat 2 kategori data yang digunakan dalam penelitian ini; meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Terhadap sejumlah data kuantitatif digunakan analisis deskriptif atau sering disebut dengan analisis kecenderungan pemusatan untuk variabel yang secara teoretis atau diasumsikan memerlukan analisis data kuantitatif. Adapun analisis kualitatif merupakan proses mengorganisir data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dibangun asumsi sesuai data (Moleong 1991).

Analisis data kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan, meliputi: (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) menarik simpulan dan verifikasi (Miles 1992).

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dan diperoleh dari lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari kegiatan analisis; dan proses reduksi data berlangsung secara terus-menerus sampai proses penelitian selesai menyusun laporan. Reduksi data juga merupakan proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final yang mencerminkan keadaan dan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan dapat diverifikasi dengan baik.

Penyajian data adalah penyediaan sekumpulan unit-unit informasi dan atau informasi tersusun (berdasarkan apa yang diperoleh selama penelitian), yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data meliputi: teks naratif, tabel, matriks, grafik, bagan; yang kesemuanya dirancang untuk menyajikan hasil penelitian kedalam bentuk mudah dipahami.

Menarik simpulan dan verifikasi; merupakan bagian terpenting proses analisis; yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik simpulan, kemudian diverifikasi, diuji validitasnya melalui sejumlah teknik. Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini dalam rangka verifikasi adalah triangulasi.

Tiga hal tersebut (reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan dan verifikasi) merupakan satu kesatuan yang jalin-menjalin yang terjadi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data; dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data Lokasi Penelitian

Berikut ini disajikan sejumlah data umum lokasi penelitian yang relevan dengan fokus analisis penelitin ini.

Pada tahun 2007 Kabupaten Malang menempati urutan tertinggi dalam hal penempatan TKI di luar negeri. Pada saat yang sama juga menempati urutan tertinggi dalam hal jumlah TKI secara keseluruhan. Berdasar data tersebut layak diduga kabupaten Malang merupakan daerah penerima remitansi tertinggi di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
dan Pendapatan Perkapita di Kabupaten Malang

No	Uraian	Satuan	2005	2006	2007
1	PDRB ADHB	Juta Rp	16.096.580,66	18.015.576,65	21.595.800,21
2	PDRB ADHK	Juta Rp	10.976.205,73	11.602.643,25	12.325.207,43
3	Pendapatan Perkapita ADHB	Rupiah/Th	6.339.843,00	7.093.700,00	8.215.877,50
4	Pendapatan Perkapita ADHK	Rupiah/Th	4.176.754,00	4.511.378,00	4.688.985,52

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2007

Tabel 2
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi di Kabupaten Malang

Uraian	Satuan	2005	2006	2007
Pertumbuhan Ekonomi ADHK	%	4,97	5,74	6,09
Inflasi	%	10,58	11,76	6,97

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2007

Tabel 3
Perkembangan Tenaga Kerja di Kabupaten Malang

No.	Uraian	Satuan	2005	2006	2007
1	Angkatan Kerja	Orang	963,204	983,769	1.166.825
2	Angkatan Kerja Tertampung	Orang	931,012	86,122	673,841
3	Pencari Kerja	Orang	61,248	55,019	45,110
4	Penduduk Usia Kerja	Orang	1.692.732	1.784.222	1.443.799
5	Penduduk Bukan Usia Kerja	Orang	672,722	45,394	576,571

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2007

Karakteristik Responden

Berdasarkan data dari 359 orang responden yang memberikan jawaban (dari 360 orang responden yang dipilih), 129 orang (35,93%) berstatus sebagai TKI-Aktif yang sedang mudik ke kampung halaman; 230 orang (64,07%) berstatus sebagai TKI-Purna atau TKI yang telah habis masa kontraknya. Dari 359 responden penelitian ini, 233 orang (64,90%) menyatakan sebagai TKI/TKI-purna kategori legal dan 126 orang (35,10%) menyatakan sebagai TKI/TKI-purna kategori ilegal. Wilayah yang memberikan kontribusi TKI ilegal tertinggi adalah kecamatan Donomulyo, yakni 55 orang (93,22%) dari 59 orang responden yang berasal dari kecamatan tersebut.

Jumlah responden laki-laki dan perempuan relatif seimbang, yakni 50,42 % laki-laki dan 49,58% perempuan. Proporsi sampel jenis kelamin yang demikian nampaknya tidak

terlalu ideal jika dibandingkan dengan proporsi jenis kelamin TKI pada tingkat populasi, mengingat menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang menunjukkan bahwa jenis kelamin TKI, sebagian besar (lebih dari 75%) adalah perempuan. Hal tersebut disebabkan surveyor di lapangan cenderung mengalami kesulitan untuk meminta para TKI/TKI-purna perempuan menjadi responden penelitian ini. Analisis *cultural-psykological* menunjukkan bahwa para TKI/TKI-purna berjenis kelamin perempuan relatif “tertutup” dan “tidak *welcome*” untuk memaparkan data yang menurutnya bersifat privasif.

Responden menurut kelompok umur yang menduduki urutan tiga teratas adalah: (1) kelompok umur 27-31 tahun mencapai 27,85%; (2) kelompok umum 32-36 tahun mencapai 21,17%; dan (3) kelompok umur 37-41 tahun mencapai 16,43%. Jadi responden dengan kelompok umur 27-36 tahun jumlahnya mencapai 65,45%. Adapun untuk pendidikan para TKI yang menduduki proporsi tertinggi pertama adalah SLTP (37,88%), proporsi tertinggi kedua pendidikan SLTA (34,26%) dan proporsi tertinggi ketiga pendidikan SD (23,96). Sebagian besar responden memiliki status marital “menikah” (67,97%). Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan para TKI bervariasi. Namun yang menduduki proporsi terbesar pertama adalah jumlah tanggungan 3 orang (28,69%), proporsi terbesar kedua adalah 4 orang (25,63), proporsi terbesar ketiga 2 orang (20,89%). Ditinjau dari lamanya TKI bekerja, terdistribusi secara relatif merata, mulai 1-2 tahun sampai dengan di atas 6 tahun.

Perkiraan Alokasi Dana Remitansi TKI

Lima jenis belanja yang menyedot remitansi TKI di kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Lima Jenis Belanja Keluarga TKI yang Dialokasikan dari Remitansi

Urut	Jenis Belanja	Proporsi
1	Merenovasi rumah	19%
2	Ditabung di bank	18%
3	Membiayai kebutuhan makan	16%
4	Biaya Pendidikan Keluarga	11%
5	Membeli Elektronik	7%

Sumber : Diolah dari Data Primr, 2008

Sebagai perbandingan, data pada tabel 5 berikut merupakan pola alokasi remitansi dari para TKI-Aktif yang sedang bekerja di Hongkong pada Tahun 2007.

Tabel 5
Jenis Belanja Para TKI yang Bekerja di Hongkong
(N = 64 orang)

No	Jenis Barang	Jumlah	Prosentase
1	Elektronik	51	79,68%
2	Perhiasan	48	75,00%
3	Kendaraan	38	59,30%
4	Rumah / Tanah	41	64,06%
5	Biaya Sekolah	32	50,00%
6	Usaha/investasi	20	31,25%

Sumber : Haryati (2007)

Jumlah Remitansi

Jumlah remitansi yang diterima oleh keluarga dari 359 orang TKI yang berasal dari kabupaten Malang rata-rata sebesar lebih kurang Rp 39.000.000,- per keluarga TKI per tahun. Ini berarti bahwa tambahan uang yang beredar di kabupaten Malang dan/atau peningkatan daya beli anggota masyarakat kabupaten Malang akibat adanya remitansi adalah lebih kurang Rp 14.001.000.000,- per tahun. Bertambahnya jumlah uang yang beredar di daerah asal TKI, akibat adanya kiriman uang dari TKI yang bekerja di Negara Asing, dapat diasumsikan sebagai satu diantara sekian faktor pemicu terjadinya inflasi di daerah asal TKI yang dimaksud.

Di antara 359 orang TKI yang terpilih sebagai sampel penelitian ini, ada yang punya kemampuan menyisihkan penghasilannya untuk remitansi kurang dari Rp 10 juta per tahun dan ada yang punya kemampuan menyisihkan penghasilannya untuk remitansi lebih dari Rp 104 juta per tahun. Lima ranking teratas menurut jumlah TKI dan jumlah remitansi yang mereka bawa pulang dan/atau mereka kirimkan kepada keluarganya di daerah asalnya per tahun adalah: Ranking pertama atau 22,28% responden adalah mereka yang memberikan remitansi antara Rp 15 – 19 juta pertahun; ranking kedua atau 20,33% responden adalah mereka yang memberikan remitansi antara Rp 10 - 14 juta pertahun; ranking ketiga atau 15,88% responden adalah mereka yang memberikan remitansi antara Rp 20 – 24 juta pertahun; ranking keempat atau 6,96% responden adalah mereka yang memberikan remitansi antara Rp 35 - 39 juta pertahun; ranking kelima atau 5,85% Responden adalah mereka yang memberikan remitansi antara Rp 40 - 44 juta pertahun.

Daya beli atau permintaan anggota masyarakat di daerah asal TKI terhadap barang dan jasa akan meningkat sebesar lebih kurang Rp 14.001.000.000,- setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah uang yang beredar di daerah asal TKI, dan/atau meningkatnya daya beli atau permintaan anggota masyarakat di daerah asal TKI terhadap barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud di atas, berpotensi untuk menjadi faktor pemicu terjadinya kenaikan harga barang di daerah asal TKI secara berkelanjutan, yang pada gilirannya

berikutnya dapat memicu terjadinya peningkatan angka inflasi tahunan di masing-masing daerah asal TKI yang dimaksud.

Dalam prakteknya, tambahan jumlah uang yang beredar pada masing-masing daerah tidak hanya disebabkan oleh adanya Remitansi yang mengalir ke daerah yang dimaksud, tetapi juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, misalnya: pertumbuhan ekonomi dan/atau investasi di daerah tersebut; kebijakan pemerintah pada bidang moneter dan fiskal; kebijakan pemerintah mengenai harga barang/jasa yang dikendalikan oleh Pemerintah

Dalam konteks ini, mengalirnya dana remitansi ke suatu daerah dapat dikatakan sebagai satu diantara sekian faktor pemicu terjadinya inflasi di daerah yang dimaksud, karena remitansi secara nyata menambah jumlah uang yang beredar di daerah asal TKI. Namun perlu disadari bahwa tambahan jumlah uang beredar yang berasal dari remitansi bukan satu-satunya faktor penyebab inflasi, oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya pengaruh remitansi terhadap inflasi perlu adanya program penelitian lanjutan yang menggunakan data time-series dan beberapa variabel lain yang ikut berpengaruh terhadap inflasi.

Inflasi dan Ketenagakerjaan

Tertampungnya pencari kerja di daerah asal TKI oleh peluang kerja yang ada di Negara Asing, berdampak pada menurunnya jumlah pencari kerja (penganggur) di daerah asal TKI. Menurut teori dan/atau kurva A.W. Phillips jumlah pengangguran berkorelasi negatif terhadap inflasi, oleh karena itu terkait TKI ini dapat dikatakan bahwa; mengalirnya TKI ke luar Negeri akan mengakibatkan berkurangnya pencari kerja (pengangguran) di daerah asal TKI dan menurut teori dan/atau kurva A.W. Phillips dapat dikatakan sebagai faktor penyebab meningkatnya inflasi di daerah asal TKI.

Perlu disadari bahwa hubungan negatif antara jumlah penganggur dengan tingkat inflasi yang dikemukakan oleh Phillips belum secara tegas menyatakan sistem ekonomi (produksi) yang dipakai sebagai obyek kajian. Dalam sistem produksi padat karya mungkin teori dan/atau kurva Phillips bisa dinyatakan berlaku, karena produktifitas sistem produksi padat karya relatif rendah, tetapi dalam sistem produksi padat modal yang produktifitasnya relatif tinggi mungkin teori dan/atau kurva Phillips ini bisa ditolak keberlakuannya. Di sisi yang lain, berkurangnya pengangguran tidak secara langsung menurunkan nilai atau harga uang secara signifikan dan meningkatkan nilai atau harga barang dan jasa secara signifikan secara terus-menerus atau berkelanjutan.

Ditinjau dari faktor penyebab inflasi lainnya, Remitansi TKI bisa berkontribusi terhadap pembentukan inflasi melalui pengaruhnya terhadap perilaku pembentukan harga di tingkat pedagang atau sering disebut dengan istilah Ekspektasi inflasi, terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, tahun baru, dan/atau saat musim

TIK pulang kampung). Dalam konteks ini, pedagang cenderung menawarkan barang atau jasanya pada tingkat yang diperkirakan mau dibayar oleh calon pembeli, dan pada kenyataannya, konsumen selalu mau membayar harga barang dengan harga yang lebih tinggi pada hari-hari besar, seperti: hari Lebaran, hari Natal, Tahun Baru, dan/atau saat TKI pulang kampung.

Kontribusi Remitansi Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat

Jumlah remitansi sebagai bentuk kiriman uang yang diterima oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tinggal di daerah asal TKI, dapat kita pandang sebagai kontribusi remitansi terhadap pembiayaan proses pembangunan sosial-ekonomi di daerah asal TKI, karena remitansi TKI berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah asal TKI. Manifestasi dari kontribusi remitansi tersebut dapat berupa peningkatan kemampuan keluarga TKI untuk memenuhi kebutuhan: pangan; sandang; papan; kesehatan; pendidikan; dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Malang tahun 2007 yang mencapai Rp. 21.595.800.210.000,-; dan berdasarkan data bahwa seorang TKI yang berasal dari kabupaten Malang rata-rata dapat mengirim remitansi sebesar Rp.39.000.00,00 per tahun; maka untuk mendapatkan remitansi setara dengan PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2007 berpeluang dapat dikontribusikan oleh remitansi dari 554 orang TKI. Sudah barang tentu ini kalkulasi komparasi yang tidak direkomendasikan, mengingat disadari sepenuhnya bahwa menjadi TKI bukanlah profesi yang diidealkan dan atau direkomendasikan oleh sejumlah kalangan. Kalau pun sebagian warga negara Indonesia masih menjai TKI, itu lebih tepat disebut sebagai “pil pahit” yang masih harus “ditelan” untuk “mengobati” penyakit sosial yang bernama kemiskinan dan pengangguran.

SIMPULAN

Sejumlah simpulan yang dapat ditarik berdasarkan data yang diperoleh dan analisis data yang telah dilakukan di sepanjang penelitian ini berlangsung adalah: Pertama, remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), berdampak pada peningkatan jumlah uang yang beredar di daerah asal TKI, sehingga meningkatkan daya beli atau permintaan anggota masyarakat di daerah asal TKI terhadap barang dan jasa, kondisi tersebut berpotensi untuk menjadi faktor pemicu terjadinya kenaikan harga barang di daerah asal TKI secara berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya peningkatan angka inflasi tahunan di masing-masing daerah asal TKI yang dimaksud.

TKI dapat dikatakan sebagai faktor yang mengurangi pencari kerja dan/atau pengangguran di daerah asal TKI, yang menurut teori dan/atau kurva Phillips dapat dikatakan sebagai faktor penyebab meningkatnya inflasi di daerah asal TKI. Ditinjau dari

faktor penyebab inflasi lainnya, remitansi TKI bisa berkontribusi terhadap pembentukan inflasi melalui pengaruhnya terhadap perilaku pembentukan harga di tingkat pedagang atau sering disebut dengan istilah ekspektasi inflasi, terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, tahun baru, dan/atau saat musim TKI pulang kampung) karena pedagang cenderung menawarkan barang atau jasanya pada tingkat yang diperkirakan mau dibayar oleh calon pembeli, dan pada kenyataannya, konsumen selalu mau membayar harga barang dengan harga yang lebih tinggi pada hari-hari yang dimaksud.

Remitansi TKI yang manifestasinya berupa aliran dana dari TKI kepada keluarganya yang ada di daerah asal, merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah asal TKI; sebab sejumlah kebutuhan primer, bahkan kebutuhan sekunder keluarga TKI dapat tercukupi dari aliran dana remitansi. Tidak dapat dipungkiri bila tercukupinya kebutuhan-kebutuhan tersebut diiringi oleh kecenderungan terjadinya peningkatan kualitas hidup mereka. Penelitian ini juga dapat menggali data bahwa sebagian besar TKI (yang menjadi sampel penelitian ini) beserta keluarganya, mengalami peningkatan keadaan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi; yang ketiganya merupakan indikator untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia. Maka peningkatan kualitas pada tiga indikator tersebut dapat diasumsikan sebagai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di kalangan TKI dan keluarganya.

Data yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa tidak semua TKI selalu dapat mengirimkan remitansi, sebab berdasarkan data yang dikumpulkan dari Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dapat diketahui bahwa tidak semua TKI disebut sukses mendapatkan sumber penghasilan di luar negeri. Sejumlah besar TKI yang bernasib malang, yang pulang dengan tangan kosong atau pulang dengan penderitaan, dan bahkan pulang tinggal nama, juga menjadi fenomena. Hanya saja data tersebut sedang tidak menjadi fokus kajian penelitian ini.

Beberapa pokok pikiran yang dipandang perlu untuk direkomendasikan mengakhiri laporan ini diantaranya adalah untuk mengefektifkan dampak remitansi TKI terhadap proses pembangunan sosial-ekonomi dan/atau menghambat peningkatan angka inflasi, diperlukan adanya Kebijakan Pemerintah yang diorientasikan kepada pemberdayaan keluarga TKI.

Agar kondisi berkurangnya pengangguran tidak memicu meningkatnya angka inflasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh teori dan/atau kurva Phillips, maka diperlukan adanya Kebijakan Pemerintah yang diorientasikan pada penyeimbangan nilai uang yang beredar dengan nilai barang yang tersedia di pasar.

Untuk menghambat perilaku pembentukan harga yang lebih tinggi di tingkat pedagang atau sering disebut dengan istilah ekspektasi inflasi, terutama pada saat menjelang hari-

hari besar, seperti: lebaran, natal, tahun baru, dan/atau saat musim TKI pulang kampung, diperlukan adanya Kebijakan Pemerintah yang diorientasikan pada pengendalian harga yang efektif terhadap barang dan jasa kebutuhan pokok dan/atau barang dan jasa yang penetapan harga pokoknya diatur oleh Pemerintah.

Untuk mengefektifkan pengaruh remitansi terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah asal TKI, perlu adanya kebijakan yang efektif dari Pemerintah dan/atau instansi yang terkait, yang diorientasikan kepada upaya meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dari kalangan TKI dan keluarganya. Adapun bentuk kebijakan yang dipandang efektif untuk diterapkan dalam rangka memberdayakan para TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif bisa bermacam-macam. Sebagai ilustrasi, kerangka kerja pengembangan TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif tersebut, sekurang-kurangnya terdiri tiga langkah berikut.

Langkah pertama, mengidentifikasi jenis dan bentuk pemberdayaan, meliputi kegiatan : (1) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kekuatan dan kelemahan dari sumberdaya yang dimiliki oleh TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif serta mengidentifikasi peluang pemanfaatan sumberdaya TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif secara lebih baik, maksudnya, pemberdayaan TKI-Purna (menjadikan TKI-Purna: mau, dan mampu membantu dirinya sendiri, serta berhasil menjadikan dirinya dan/atau usahanya sukses secara berkelanjutan (*sustainable*) dan bagi keluarga TKI Aktif supaya ketika pulang sudah memiliki usaha yang siap dilanjutkan atau dikembangkan pengelolaannya. Di sini memerlukan program dan kegiatan survei, yang diorientasikan untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemberdayaan TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif. (2) Mengidentifikasi kemampuan TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif dalam hal apa yang dapat dilakukan secara lebih efektif oleh TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif?, mengidentifikasi masukan sumberdaya untuk setiap kemampuan dan kompleksitas dari masing-masing kemampuan, maksudnya, hasil pelaksanaan survei yang dimaksud dalam butir (1) tersebut harus menghasilkan jenis dan tingkat kemampuan TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif dalam bidang-bidang pekerjaan dan/atau usaha yang pernah dan sedang ditekuninya. Pada tahap ini juga dilakukan pengidentifikasian jenis dan kualifikasi sumberdaya yang diperlukan dalam menyukseskan pekerjaan dan/atau usaha TKI-Purna maupun keluarga TKI-Aktif. (3) Menilai potensi sumberdaya dan kemampuan TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif untuk menciptakan keunggulan dalam merealisasikan potensinya untuk menekuni bidang usaha/profesi, dan kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan yang memadai, maksudnya langkah atau program pertama ini harus menghasilkan informasi tentang potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh TKI-Purna dalam mewujudkan keberhasilan usaha/profesinya di masa mendatang.

Langkah kedua, merumuskan dan melaksanakan strategi/rencana pengembangan sumberdaya bagi kalangan TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif, meliputi: (1) memilih dan merumuskan strategi pemberdayaan dan/atau rencana pengembangan kapasitas TKI-

Purna dan keluarga TKI-Aktif yang dipandang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang usaha ekonomi produktif yang ada di lingkungan tempat tinggalnya secara efektif agar tercipta sumber mata pencaharian yang berlanjut; (2) Mengimplementasikan atau melaksanakan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam butir (1) di atas.

Langkah ketiga, mengevaluasi pelaksanaan strategi/rencana dan merumuskan strategi/rencana pengembangan berikutnya: (1) menilai kinerja pelaksanaan strategi dan/atau rencana pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud dalam langkah kedua; (2) mengidentifikasi ketimpangan sumberdaya yang perlu dipenuhi dan direinvestasi, misalnya dalam hal melengkapi, menambah, dan memperbaharui sumberdaya yang dimiliki oleh TKI-Purna dan keluarga TKI-Aktif; (3) merumuskan dan melaksanakan strategi/rencana pemberdayaan lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia Surabaya. 2007. *Pola Pengiriman Remitansi TKI asal Jawa Timur*. Laporan Hasil Survey, Surabaya.

Bank Indonesi Surabaya. 2008. *Laporan Hasil Survey Remitansi TKI di Provnsi Jawa Timur*. Surabaya.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2006. *Laporan Tahunan Kondisi Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, 2007, *Informasi Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Timur*, Surabaya.

Sumarsono. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. Jakarta.

International Monetary Found (IMF). 2008. *Dinamic of Inflation*. New York.

Malo, M dan Trisnoningtias S.1989; *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PAU-Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia. Jakarta.

Mambo. 2008. *Indikator Inflasi*, dalam <http://investaso.com/great-investaso.com>. generated 6 December 008. 20.25.

Miles, Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. alih bahasa: Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta. UI Press.

- Moleong, L.J. 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Musthafa, M. 2009. “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Makro terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di Bursa Efek Indonesia”, dalam *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.13 No. 1 – Maret 2009.
- Haryati, Eny. 2004. *TKI, Antara Devisa dan Martabat Bangsa*. Artikel Opini Harian Surya 8-11-2004. Surabaya.
- Haryati, Eny. 2007. *Laporan Hasil Survey Sosial-Ekonomi Tenaga Migran Asal Jawa Timur yang Bekerja di Hongkong*. Dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Surabaya.
- Miles, Matthew dan Michael Huberman, (1992), *Analisis data Kualitatif*, alih bahasa: Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press.
- United Nations Development Program (UNDP). 2007. *Human Development Report*. New York.
- Wawa, Jannes Eudes. 2005. *Ironi Pahlawan Devisa*. Penerbit Buku Kompas Gramedia. Jakarta.